



Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas: Implementasi dan Tantangan dalam Pengelolaan di Kabupaten Sidoarjo (Periode 2022-2024)

Ifa Febyanti Nabiilah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sosial serta dinamika pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo pada periode 2022–2024. Fokus penelitian diarahkan pada jenis bantuan sosial yang diberikan, mekanisme penyaluran, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini penting dilakukan mengingat penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial guna menjamin pemenuhan hak dasar dan peningkatan kualitas hidup. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi pelaksana program bantuan sosial, serta didukung oleh studi literatur dari jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen kebijakan yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial, antara lain bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan alat bantu disabilitas, serta bantuan permakanan. Program bantuan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kesejahteraan, dan kemandirian penyandang disabilitas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan anggaran dan ketidaktepatan data penerima manfaat, yang berdampak pada efektivitas penyaluran bantuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pendataan penerima bantuan melalui pemutakhiran data secara berkala serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Orang dengan Disabilitas, Bantuan Sosial, Kebijakan Sosial, Dinas Sosial, Sidoarjo.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.389>

*Correspondence: Ifa Febyanti Nabiilah

Email: ifafebyantinabiilah@gmail.com

Received: 21-01-2026

Accepted: 21-02-2026

Published: 21-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the social conditions and dynamics of social assistance for persons with disabilities in Sidoarjo Regency during the period 2022–2024. The study focuses on the types of social assistance provided, the distribution mechanisms, and the obstacles encountered in its implementation. This research is important considering that persons with disabilities are a vulnerable group who need social protection to ensure the fulfillment of their basic rights and improve their quality of life. The research method uses a qualitative approach with a descriptive nature. Data collection was carried out through in-depth interviews with the Sidoarjo Regency Social Service as the agency implementing the social assistance program, and was supported by a literature study from scientific journals, official reports, and relevant policy documents. The data obtained was analyzed qualitatively to comprehensively describe the implementation of the social assistance program for persons with disabilities. The results of the study show that the Sidoarjo District Social Service distributes various forms of social assistance, including cash assistance, basic food assistance, disability assistance, and food assistance. These assistance programs have made a positive contribution to meeting basic needs, improving welfare, and promoting independence among persons with disabilities. However, several major obstacles have been encountered in their implementation, namely budget constraints and inaccuracies in beneficiary data, which have impacted the effectiveness of aid distribution. Therefore, it is necessary to strengthen the beneficiary data system through regular data updates and improved coordination and collaboration across sectors. These efforts are expected to promote more effective, transparent, and targeted social assistance distribution for persons with disabilities.

Keywords: People with Disabilities; Social Assistance; Social Policy; Social Service Agency; Sidoarjo.

Pendahuluan

Penyandang disabilitas merupakan kelompok sosial yang secara konsisten menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial yang membatasi akses mereka terhadap layanan dasar, partisipasi public dan kesejahteraan secara umum. Hambatan ini mencakup keterbatasan akses terhadap Pendidikan yang layak, kesempatan kerja yang setara, layanan Kesehatan yang memadai, transportasi public yang inklusif, serta lingkungan sosial yang ramah terhadap perbedaan kemampuan. Studi menunjukkan bahwa infrastruktur publik dan layanan sosial yang belum sepenuhnya ramah disabilitas terhadap layanan dasar dan fasilitas umum. (Maimunah et al, 2025) Disabilitas tidak semata-mata dipahami sebagai kondisi individual, melainkan sebagai hasil interaksi antara keterbatasan fungsional seseorang dengan lingkungan social dan fisik yang tidak mendukung partisipasi penuh di Masyarakat (Juwantara, 2020). Perspektif ini menegaskan bahwa permasalahan disabilitas tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab social dan kebijakan publik yang berkeadilan.

Di Indonesia, komitmen negara terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas semakin menguat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara dengan warga negara lainnya. Undang-Undang ini menempatkan negara sebagai actor utama yang bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara nondiskriminatif melalui kebijakan, program, dan layanan public yang inklusif (Umar et al, 2025).

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi kebijakan inklusif di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesenjangan antara kebijakan dan praktik sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya kapasitas kelembagaan, serta minimnya pemahaman aparatur terhadap prinsip inklusi social (Maimunah et al, 2025). Kondisi ini berdampak langsung pada terbatasnya akses penyandang disabilitas terhadap layanan dasar, terutama Pendidikan dan kesehatan yang ramah disabilitas.

Dalam konteks layanan kesehatan, penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk hambatan, baik secara fisik, administrative, maupun komunikasi. Akses layanan kesehatan yang setara belum sepenuhnya terwujud karena fasilitas kesehatan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas membutuhkan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi. (Mahera et al, 2023)

Selain itu, tantangan signifikan juga muncul dalam aspek ekonomi dan jaminan sosial. Penyandang disabilitas, khususnya yang bekerja di sektor informal, menghadapi kerentanan ekonomi yang lebih tinggi akibat keterbatasan akses terhadap jaminan sosial

dan perlindungan kerja (Islahatusani, 2025). Kerentanan ini memperkuat posisi penyandang disabilitas sebagai kelompok yang berisiko tinggi mengalami kemiskinan structural apabila tidak didukung oleh kebijakan bantuan sosial yang efektif.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penyandang disabilitas relatif tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo (2023), tercatat lebih dari 3.000 penyandang disabilitas yang tersebar di 18 kecamatan. Mayoritas dari mereka berada pada kelompok ekonomi menengah ke bawah, sehingga memiliki tingkat rentan sosial dan ekonomi yang tinggi serta membutuhkan intervensi kebijakan yang berkelanjutan.

Bantuan sosial menjadi salah satu instrument utama dalam system perlindungan sosial untuk menjamin kesejahteraan kelompok rentan. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021), bantuan sosial merupakan upaya pemerintah dalam bentuk bantuan tunjangan, pangan, dan layanan rehabilitasi sosial yang bertujuan mengurangi beban ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat (Nias, 2025). Bagi penyandang disabilitas, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai penopang ekonomi tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi sosial dan kemandirian.

Namun demikian, implementasi program bantuan sosial di daerah sering kali dihadapkan pada berbagai kendala. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran, ketidakakuratan data penerima manfaat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama dari penghambatan efektifitas penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lapangan yang mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika penyaluran bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Sidoarjo (Fuaddah & Fridayne, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengidentifikasi jenis bantuan sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo; Menganalisis mekanisme dan pelaksanaan program tersebut; serta Menelaah tantangan dan strategi yang diambil oleh Dinas Sosial dalam mengoptimalkan pelaksanaan bantuan sosial selama periode 2022–2024.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam realitas sosial terkait implementasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami proses kebijakan, pengalaman institusional, serta dinamika pelaksanaan bantuan sosial secara kontekstual dan komprehensif, sesuai dengan karakteristik penelitian kebijakan sosial (Fadli, 2021).

Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel dan mendalam mengenai kebijakan bantuan sosial, jenis bantuan yang diberikan, kendala dalam pelaksanaan, serta strategi pemerintah daerah dalam pemenuhan hal penyandang disabilitas.

Sumber data sekunder diperoleh dari laporan tahunan pengurus Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, serta literatur akademik berupa jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan topik perlindungan sosial dan pemberdayaan penyandang disabilitas, yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020-2025. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan mendukung proses validasi data.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara simultan dan berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga tahap penulisan hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti melakukan pendalaman dan klarifikasi data secara sistematis (Rijali, 2018).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga dengan membandingkan berbagai sumber data, yaitu hasil wawancara, dokumen elektronik dan komunikasi tertulis yang diperoleh langsung dari pengurus Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, serta literatur ilmiah yang relevan. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diakses atas permintaan yang wajar kepada penulis, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas informan. Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip etika penelitian sosial, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari informan dan menjamin anonimitas data yang digunakan untuk kepentingan akademik.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan melalui beberapa skema bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Data yang disajikan dalam bagian ini merupakan hasil pengumpulan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Selain jenis bantuan, hasil penelitian juga mencatat jumlah penetima bantuan sosial penyandang disabilitas dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menggambarkan dinamika cakupan penerima bantuan sosial di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan data resmi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, jumlah penerima bantuan sosial penyandang disabilitas mengalami perubahan selama periode 2022-2024

Rincian jumlah penerima bantuan sosial tersebut disajikan pada Table 1.

Table 1. Jumlah Penerima Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2024

| Jumlah Penerima Bantuan | Tahun |
|-------------------------|-------|
| 7.584 | 2022 |
| 3.871 | 2023 |
| 3.818 | 2024 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo (diolah, 2025).

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, jumlah penerima bantuan sosial penyandang disabilitas pada tahun 2022 tercatat sebanyak 7.584 orang. Pada tahun 2023, jumlah penerima bantuan mengalami penurunan menjadi 3.871 orang. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah penerima bantuan tercatat sebanyak 3.818 orang. Data tersebut menunjukkan adanya perubahan jumlah penerima bantuan sosial selama periode pengamatan.

Jenis Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

Hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa terdapat empat jenis bantuan sosial utama yang diberikan kepada penyandang disabilitas, yaitu bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan alat bantu disabilitas, dan bantuan permakanan. Keempat jenis bantuan ini merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang berlandaskan pada peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Data hasil dari wawancara mengindikasikan bahwa setiap jenis bantuan memiliki sasaran penerima dan mekanisme penyaluran yang berbeda disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi penyandang disabilitas. Secara umum, pelaksanaan bantuan sosial dilakukan melalui proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.

1. Bantuan Tunai

Mekanisme penyaluran bantuan tunai melalui rekening bank telah menjadi bagian dari strategi pemerintah Indonesia dalam memperkuat tata kelola bantuan sosial non-tunai. Transfer langsung ke rekening memberikan kejelasan administratif karena setiap proses pembayaran terdokumentasi dan tersimpan secara elektronik, sehingga memudahkan pelacakan dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Penelitian yang menganalisis program bantuan sosial non-tunai di Indonesia menunjukkan bahwa penyaluran dana melalui sistem transfer langsung ke rekening bank meningkatkan transparansi dan akuntabilitas saluran bantuan, serta berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap

layanan keuangan formal. Sebagai contoh, dalam kajian implementasi program bantuan sosial di Kota Tanjungpinang dijelaskan bahwa sistem transfer langsung dan non-tunai telah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan inklusi keuangan bagi masyarakat penerima bantuan, meskipun tantangan tetap ada terkait akurasi data dan koordinasi antar lembaga (Siahaan et al, n.d.).

Berdasarkan keterangan narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, setiap penerima manfaat dibuatkan rekening bank atas nama yang bersangkutan untuk mempermudah proses penyaluran bantuan. Praktik ini sejalan dengan temuan penelitian terkait implementasi program bantuan sosial non-tunai di Indonesia, yang menunjukkan bahwa penyaluran dana melalui rekening pribadi penerima meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memberikan kendali lebih besar kepada penerima manfaat terhadap dana yang diterima, sekaligus mengurangi potensi intervensi perantara (Siahaan et al, n.d.).

Untuk penerima manfaat yang masih di bawah umur atau belum memiliki kapasitas hukum untuk mengelola rekening secara mandiri, pengelolaan rekening bantuan dilakukan melalui wali yang sah. Pengaturan perwalian ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan administratif agar hak dan kepentingan penerima manfaat tetap terjaga, misalnya ketika rekening atau hak finansial lainnya perlu diatur atas nama orang yang belum mampu bertindak sendiri. Dalam konteks hukum Indonesia, sistem perwalian diatur melalui ketentuan hukum yang memungkinkan penetapan wali untuk mewakili kepentingan individu yang belum cakap secara hukum, termasuk penyandang disabilitas atau anak yang belum dewasa. Penelitian yang menelaah konsep perwalian bagi penyandang disabilitas menegaskan bahwa perwalian dimaksudkan untuk menjamin bahwa individu yang belum memiliki kapasitas hukum tetap dapat menikmati hak-haknya melalui penunjukan wali, meskipun praktiknya perlu dikelola dengan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (Panglipurjati, n.d.).

Selain itu, data lapangan menunjukkan bahwa bantuan tunai diberikan secara berkala sesuai dengan ketentuan anggaran dan kebijakan yang berlaku. Penerima manfaat yang telah terdaftar dalam basis data Dinas Sosial akan menerima bantuan selama memenuhi kriteria sebagai penyandang disabilitas yang berhak memperoleh perlindungan sosial. Studi akademik menunjukkan bahwa keberlanjutan program bantuan tunai sangat bergantung pada keberadaan dan kualitas sistem pendataan terpadu seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), karena data tersebut menjadi basis utama dalam menentukan calon penerima manfaat dan melakukan penyaluran bantuan secara tepat sasaran. Penelitian tentang penggunaan aplikasi pendataan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial di Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa integrasi data sosial

secara digital membantu mempercepat proses pendataan dan menurunkan risiko distribusi bantuan yang tidak tepat (Pakaya, 2025).

Dengan demikian, penyaluran bantuan tunai melalui rekening bank tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi dana, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola bantuan sosial. Mekanisme ini mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak penerima manfaat, khususnya penyandang disabilitas, yang memerlukan sistem penyaluran bantuan yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

2. Bantuan Sembako

Bentuk bantuan sosial lainnya yang diberikan kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo adalah bantuan sembako. Bantuan ini biasanya berupa paket kebutuhan pokok yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, serta berbagai bahan pangan lain yang dibutuhkan setiap hari. Bantuan sembako diprioritaskan bagi penyandang disabilitas yang tidak memiliki penghasilan tetap, khususnya mereka yang termasuk dalam kategori disabilitas berat atau hidup sendiri tanpa dukungan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Sosial, bantuan ini diberikan secara berkala dengan tujuan menjaga ketahanan pangan penerima manfaat, sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus khawatir terhadap ketersediaan makanan sehari-hari.

Proses distribusi bantuan sembako biasanya dilakukan langsung oleh petugas lapangan atau melalui titik-titik distribusi yang telah ditentukan sebelumnya, dan setiap penyaluran dicatat serta didokumentasikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban program. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang mengevaluasi pelaksanaan program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas di Kota Jakarta, yang menunjukkan bahwa jenis bantuan pangan semacam ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan permakanan dasar serta meningkatkan kesejahteraan sosial penerima, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah tantangan administratif dan logistik, seperti kesulitan pelaporan digital dan distribusi di wilayah geografis yang sulit dijangkau. Penelitian tersebut menyatakan bahwa program bantuan permakanan pada dasarnya berhasil mencapai sebagian besar tujuan yang ditetapkan, namun perlu adanya peningkatan dalam aspek pemutakhiran data, pelaporan, dan perluasan cakupan penerima manfaat untuk menjamin keberlanjutan bantuan (Hermawati et al, 2025).

Selain itu, kajian lain mengenai implementasi program bantuan sembako di wilayah lain menunjukkan bahwa kegiatan penyaluran bantuan pangan dilakukan berdasarkan pendataan penerima yang terintegrasi dengan basis data sosial, dan pencapaian tujuan program sangat bergantung pada keakuratan data dan koordinasi antar pelaksana. Upaya

pemerataan bantuan sosial pangan seperti ini dianggap penting dalam menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat kurang mampu, termasuk penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik melalui dukungan kebutuhan dasar yang konsisten dan terjadwal (Afifah et al, 2025).

3. Bantuan Alat Bantu Disabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyalurkan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan. Jenis alat bantu yang diberikan meliputi kursi roda, tongkat, walker, alat bantu dengar, serta beberapa alat bantu lain yang mendukung mobilitas dan kemandirian penyandang disabilitas. Pemberian alat bantu ini dilakukan berdasarkan hasil asesmen lapangan yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial, sekaligus rekomendasi dari tenaga rehabilitasi social. (Wati et al, 2025) Hal ini bertujuan agar setiap alat bantu yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi fisik dan kebutuhan fungsional penerima, sehingga dapat digunakan secara efektif dalam aktivitas sehari-hari.

Menurut pernyataan petugas Dinas Sosial, mengatakan bahwa sebelum penyaluran alat bantu, petugas Dinas Sosial biasanya melakukan survei langsung ke rumah calon penerima. Survei ini meliputi penilaian terhadap kondisi fisik, ruang gerak, serta kemampuan penerima dalam menggunakan alat bantu. Dengan demikian, setiap penerima mendapatkan alat yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga manfaat bantuan dapat maksimal (Fajriyani & Nurmanina, 2025). Data lapangan menunjukkan bahwa distribusi alat bantu tidak dilakukan secara massal, melainkan bersifat selektif dan berbasis kebutuhan individu, karena harus mempertimbangkan keterbatasan anggaran serta memastikan efektivitas penggunaan alat bantu yang diberikan. Pendekatan ini juga membantu Dinas Sosial untuk melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan alat bantu, sehingga program dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Pemberian alat bantu disabilitas bukan hanya sekadar memberikan barang, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemberdayaan sosial. Dengan alat bantu yang tepat, penyandang disabilitas dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri, mengurangi ketergantungan pada orang lain, dan meningkatkan kualitas hidup serta partisipasi sosial mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan program rehabilitasi sosial di Indonesia, yang menempatkan alat bantu sebagai salah satu instrumen penting untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas secara berkelanjutan (Wati et al, 2025)

Bantuan Permakanan

Bantuan permakanan merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas berat, khususnya mereka yang tinggal sendiri atau berada di panti sosial. Bantuan ini diberikan dalam bentuk makanan siap saji maupun bahan

makanan mentah yang bergizi, sehingga penerima tetap memperoleh nutrisi yang cukup meskipun memiliki keterbatasan dalam memasak atau mengelola kebutuhan pangan sehari-hari (Putra, 2025). Penyaluran bantuan dilakukan secara rutin dan terjadwal, dengan mekanisme yang diatur oleh petugas lapangan untuk memastikan setiap penerima mendapatkan bantuan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memastikan bahwa menu makanan yang diberikan telah disesuaikan dengan standar gizi yang dianjurkan, sehingga bantuan tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung kesehatan dan kualitas hidup penerima. Data lapangan menunjukkan bahwa bantuan permakanan disalurkan kepada penerima yang telah terdaftar dan diverifikasi melalui basis data Dinas Sosial, serta diawasi oleh petugas lapangan guna menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran. Pendekatan ini sejalan dengan praktik program bantuan permakanan di beberapa daerah di Indonesia, di mana bantuan diberikan secara terjadwal dan tertarget untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian serta meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas (Hermawati et al, 2025).

Tantangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo menghadapi sejumlah tantangan. Dua tantangan utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan anggaran dan kesalahan data penerima bantuan.

1. Keterbatasan Anggaran

Berdasarkan keterangan narasumber, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo belum mencukupi untuk menjangkau seluruh penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan sosial. Jumlah penyandang disabilitas yang terus meningkat setiap tahun tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Akibat keterbatasan anggaran tersebut, Dinas Sosial harus melakukan penentuan prioritas penerima bantuan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi. Proses penentuan prioritas ini dilakukan melalui asesmen dan verifikasi lapangan.

2. Kesalahan Penerima Data Bantuan Sosial

Selain keterbatasan anggaran, hasil penelitian juga menunjukkan adanya permasalahan terkait validitas data penerima bantuan sosial. Narasumber menyampaikan bahwa masih ditemukan data penerima yang tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, seperti penerima yang telah pindah domisili atau meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam basis data. Permasalahan ini berkaitan dengan keterbatasan dalam proses

pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum dapat dilakukan secara cepat dan berkelanjutan, karena pemutakhiran data seringkali melalui tahapan administrasi dan verifikasi yang panjang. Akibatnya, terdapat jeda waktu antara perubahan status sosial penerima dan pembaruan data dalam sistem, sehingga ketidaksesuaian data berdampak pada ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Studi tentang efektivitas verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi data belum sepenuhnya efektif, sehingga masih terdapat hambatan dalam memastikan bahwa data yang digunakan untuk penetapan bantuan sosial benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Tamrin, 2023).

Strategi Penguatan Program

Untuk mengatasi permasalahan ketidaktepatan data penerima bantuan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menerapkan beberapa strategi. Pertama, **validasi Data Terpadu** dilakukan melalui sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta RT/RW setempat untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat. Strategi ini sejalan dengan temuan penelitian mengenai pengelolaan DTKS berbasis SIKS-NG, yang menekankan pentingnya pemutakhiran data secara rutin dan integrasi antarinstansi agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran (Ulum et al, 2024).

Kedua, kolaborasi dengan komunitas disabilitas dilakukan dengan melibatkan komunitas lokal dalam proses pendataan dan pendampingan sosial. Pendekatan partisipatif ini membantu pemerintah memahami kebutuhan spesifik penyandang disabilitas sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program sosial. Peran organisasi masyarakat sipil penting sebagai mitra pemerintah dalam pemantauan dan pendampingan program bantuan sosial agar tepat sasaran (Prasetyo, Suncoko, Yulianti, Santono & Anik, 2024).

Ketiga, optimalisasi anggaran dilakukan dengan pengajuan dana tambahan ke Kementerian Sosial setiap tahun untuk memperluas cakupan program. Strategi ini didukung oleh literatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan, yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan serta keberlanjutan program social (Sari et al, 2024).

Pendekatan gabungan ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang efektif tidak hanya bergantung pada anggaran atau mekanisme administratif, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif penerima manfaat dan komunitas lokal. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh penyandang disabilitas.

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo telah mencakup berbagai dimensi kebutuhan, termasuk kebutuhan ekonomi, pangan, mobilitas, dan nutrisi. Keberagaman jenis bantuan mulai dari bantuan tunai, sembako, alat bantu disabilitas, hingga permakanaan menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha menerapkan pendekatan perlindungan sosial yang komprehensif dan berfokus pada kesejahteraan penyandang disabilitas.

Penyaluran bantuan tunai melalui rekening bank meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mekanisme ini mendukung pengelolaan keuangan publik yang lebih baik dan memberikan fleksibilitas bagi penerima dalam menentukan prioritas pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Bantuan tunai juga berperan penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya beli penyandang disabilitas (Sulistiyowati, 2024).

Bantuan sembako dan permakanaan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan bagi kelompok yang tidak memiliki penghasilan tetap atau hidup sendiri, sekaligus memastikan akses mereka terhadap kebutuhan dasar yang bergizi. Bantuan pangan terbukti dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga sekaligus meningkatkan asupan nutrisi bagi kelompok rentan (Suyasa et al, 2024).

Pemberian alat bantu disabilitas memberikan manfaat ganda, yaitu secara fisik membantu mobilitas penerima dan secara psikososial meningkatkan rasa percaya diri serta partisipasi sosial. Penggunaan alat bantu disabilitas dapat memperluas kesempatan partisipasi sosial dan mendukung peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas (Hermawati et al, 2025).

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan signifikan yang memengaruhi efektivitas program. Keterbatasan anggaran membatasi jangkauan bantuan dan memaksa pemerintah daerah untuk memprioritaskan penerima berdasarkan tingkat kebutuhan dan kategori disabilitas. Keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam memastikan keberlanjutan program sosial di tingkat lokal (Getzemani et al, 2024).

Kesalahan data penerima bantuan menjadi isu kritis yang dapat menghambat pencapaian tujuan program. Data yang tidak mutakhir, seperti penerima yang telah pindah atau meninggal tetapi masih tercatat dalam DTKS, menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan. Dampaknya termasuk pemborosan anggaran dan ketidakadilan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan tetapi belum tercakup. Hal ini menegaskan pentingnya sistem pendataan terpadu yang diperbarui secara berkala dan didukung teknologi informasi yang memadai. (Ariyani & Sarwandianto, 2025)

Strategi penguatan yang diterapkan oleh Dinas Sosial, seperti validasi data terpadu, kolaborasi dengan komunitas disabilitas, dan optimalisasi anggaran, menunjukkan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang dapat meningkatkan efektivitas program. Pendekatan partisipatif ini menekankan pentingnya keterlibatan penerima manfaat dalam proses perumusan kebijakan publik agar program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (Krismiyaningsih et al, 2024)

Secara teoretis, temuan ini mendukung pandangan bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas data, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi pemangku kepentingan. (Salsabila, n.d.) Secara praktis, hasil penelitian ini menekankan pentingnya integrasi sistem informasi, penguatan kapasitas petugas lapangan, dan kolaborasi dengan komunitas agar bantuan sosial dapat disalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Selain itu, tren jumlah penerima bantuan dari tahun 2022 hingga 2024 (7.584 pada 2022, 3.871 pada 2023, dan 3.818 pada 2024) menunjukkan adanya dinamika yang signifikan dan perlu dianalisis lebih lanjut. Penurunan jumlah penerima dapat mencerminkan perbaikan validitas data, perubahan demografis, atau keterbatasan anggaran, sehingga pemantauan data secara berkala dan evaluasi program menjadi elemen penting untuk memastikan efektivitas jangka panjang program bantuan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun program bantuan sosial di Kabupaten Sidoarjo telah memberikan manfaat nyata, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan struktural dan operasional. Diskrepansi data, keterbatasan anggaran, dan kapasitas kelembagaan menjadi faktor yang menentukan apakah program dapat mencapai tujuan perlindungan sosial secara optimal. Temuan ini memiliki implikasi bagi pembuat kebijakan, perencana program, dan akademisi yang tertarik pada efektivitas intervensi sosial, serta menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara kebijakan, implementasi, dan evaluasi berbasis data.

Simpulan

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting terhadap pengelolaan kebijakan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, baik dalam bentuk bantuan tunai, sembako, alat bantu disabilitas, maupun permakanan, memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian penyandang disabilitas. Bantuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan mobilitas, rasa percaya diri, serta partisipasi sosial penerima manfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, temuan mengenai keterbatasan anggaran dan kesalahan data penerima manfaat menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial masih menghadapi tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius. Keterbatasan alokasi anggaran berdampak pada belum optimalnya jangkauan penerima bantuan, sementara data yang tidak mutakhir berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan bantuan sosial sangat bergantung pada kekuatan sistem pendataan dan koordinasi lintas sektor di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam implementasi kebijakan sosial. Keterlibatan komunitas disabilitas dan aktor lokal dalam proses pendataan serta pendampingan sosial menjadi faktor strategis untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, dan keberlanjutan program. Dengan menempatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai subjek dalam proses kebijakan, program bantuan sosial berpotensi memberikan dampak yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak bantuan sosial terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran agar diperoleh hasil yang lebih terukur. Selain itu, penelitian di masa mendatang dapat melibatkan secara langsung perspektif penerima manfaat serta memperluas wilayah kajian ke daerah lain guna memperoleh perbandingan implementasi kebijakan. Secara praktis, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat sistem pendataan terpadu melalui pembaruan data berkala, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, serta mengembangkan program bantuan sosial yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

- Afifah, N. N., Windawati, W., & Khumayah, S. (2025). Effectiveness of the Implementation of the Basic Food Assistance (Sembako) Program in Improving the Welfare of the Underprivileged Community. *3*(3), 580–587.
- Ariyani, L., & Sarwandianto, A. (2025). Penerapan Platform Informasi Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). *3*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *21*(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fajriyani, N. A., & Nurmanina, A. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Alat Bantu Difabel pada Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda. *7*(1). <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.7355>

- Fuaddah, A., & Fridayne, R. (2023). Literasi Digital Masyarakat sebagai Respon Persoalan Bantuan Sosial yang Tidak Tepat Sasaran (Studi Kasus di Kelurahan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial. Bantuan yang kelompok maupun masyarakat dengan kategori finansial). *4*(2), 74–82.
- Getzemani, M., Palili, I., Indriasari, R., & Kartini, D. E. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *8*, 7746–7754.
- Hermawati, I., Pemerintahan, M. I., Tinggi, S., & Masyarakat, P. (2025). Program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2024 : Pendekatan CIPP dalam Konteks Perlindungan Sosial di Indonesia. 75–91.
- Islahatusani, F. (2025). Kesenjangan Akses Jaminan Sosial dan Perlindungan Kerja bagi Pekerja Informal Penyandang Disabilitas. 8880–8887.
- Juwantara, R. A. (2020). Pemenuhan hak difabel di uin sunan kalijaga dan universitas atma jaya yogyakarta. *7*(2), 253–270. <https://doi.org/10.14421/ijds.070204>
- Krismiyaningsih, E., Sagala, S., Fitrintia, I. S., Zahra, R. A., & Darmawan, A. B. (2024). Integrasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial dalam Kerangka Perlindungan Sosial Adaptif Integration of Social Assistance and Security Programs in an Adaptive Social Protection Framework. *4*(1), 15–28.
- Mahera, A. W., Sokib, A., & Zidny, M. I. (2023). Implementasi Prinsip Kesetaraan dalam Akses Layanan Kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas. *7*, 25498–25502.
- Maimunah, S., Cipta, N., & Csr, P. (2025). Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Aksesibilitas Inklusif : Implementasi Infrastruktur Publik Ramah Disabilitas Di Indonesia (Sebuah Literatur Reveiw). *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*. *7*(2), 250–276. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.60851>
- Nias, U. (2025). *Analisis Program Bantuan Sosial Pemerintah Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Desa Tetehosi Afia Mazingo*. *5*(1), 167–180.
- Pakaya, R. (2025). Implementasi Aplikasi Sidak Sosial Dalam Meningkatkan Efektivitas Pendataan Dan Penyaluran Bantuan Sosial Di Provinsi Gorontalo. *3*(2), 31–37.
- Panglipurjati, P. (n.d.). Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dalam Paradigma Supported Decision Making. 79–109.
- Prasetyo, Y. E., Suncoko, R. A., Yulianti, R., Santono, D. A., & Anik, M. (2024). *Dilema Bansos: Pembelajaran dari Pandemi dan Urgensi Reformasi Tata Kelola*. *50*(1), 177–186. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8712>

- Putra, D. M. (2025). Program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Jakarta. 29–41.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. *17*(33), 81–95.
- Salsabila, N. W. (n.d.). Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi : Tinjauan dari Persepsi Mahasiswa dan Masyarakat. *4*, 5507–5513.
- Sari, N., Parawu, H. E., & Taufik, A. (2024). Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. *10*.
- Siahaan, S. T., Siregar, A. C., Aryanisah, B. & Pangestoeti, W. (n.d.). Relevansi dan Tantangan Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Mendorong Pemulihan *Ekonomi Lokal di Kota Tanjungpinang*. *8*.
- Sulistiyowati, F. (2024). Utopia Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat. *314*, 214–224.
- Suyasa, I. M. G., Retnosari, L., & Taufiq, N. (2024). Tepatkah Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia? Is the Social Assistance Program Appropriate in Indonesia ' s Poverty Alleviation ? *4*(1), 42–52.
- Tamrin, L. (2023). Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Dalam Verifikasi dan Validasi Data Penerima Dana Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru. *7*(1), 177–182.
- Ulum, T. & Purwatiningsih, A. (2024). Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berbasis Aplikasi Siks-Ng Di Dinas Sosial. *11*, 184–187.
- Umar, R., Lahaling, H., & Rasmulyadi, R. (2025). *Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan Inklusif*. *12*(2020), 138–145.
- Wati, R., Yasmin, A., Bagus, I., Widana, P. & Ferdaus, N. N. (2025). Penguatan Kemandirian Penyandang Disabilitas Melalui Distribusi Alat Bantu Di NTB Penyandang Disabilitas Didefinisikan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Sebagai Individu Yang Mengalami Keterbatasan Fisik, Intelektual, Mental, Disabilitas Sebagai Upaya Meningkatkan Aksesibilitas, Mobilitas, Dan Kemandirian Kelompok Ini Hidup.